

Semoga bukan "Genosida" Bahasa Daerah

SABTU (MANIS) 12 JANUARI 2013
29 SAFAR 1434 H
SAPAR 1946

Dadang Iskandar

Dosen Kopertis IV Jabar Banten
dpk FKIP Unpas Bandung



KEHIDUPAN masyarakat dan bangsa Indonesia diberkahi dengan kenyataan adanya berbagai budaya etnis sebagaimana yang diakui di dalam lambang negara Bhinneka Tunggal Ika.

Kebinekaan menggambarkan betapa beragamnya budaya yang hidup berkembang di Indonesia. Dengan beragamnya budaya ini, pada satu sisi dapat menimbulkan berbagai persoalan sebagaimana terjadi di negeri ini, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghargai hak-hak orang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam rancangan struktur Kurikulum 2013, Kemendikbud belum menempatkan mata pelajaran tersendiri berkenaan dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural secara "klise" baru diberikan secara teori yang terintegrasi

dalam setiap mata pelajaran. Kenapa penulis tuliskan secara "klise", karena jawaban itu selalu diberikan kepada setiap orang yang menghendaki diwujudkan pendidikan multikultural dalam struktur kurikulum.

Pada rancangan Kurikulum 2013, Kemendikbud menggagas penempatan mata pelajaran seni budaya dan prakarya yang harus ditempuh oleh setiap peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah. Penempatan mata pelajaran ini dalam Kurikulum 2013 sudah sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Namun, rancangan struktur Kurikulum 2013 dengan ada pemisahan antara unsur seni budaya dan prakarya dari budaya mengindikasikan ketidakkonsistenan. Jika kata budaya merupakan kata dasar dari kebudayaan, bukankah seni dan prakarya merupakan salah satu unsur dari kebu-

dayaan. Atau jika kata budaya digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang indah dalam kehidupan bermasyarakat, bukankah seni sudah termasuk ke dalam budaya?

Melihat inkonsistensi tersebut, mengapa bahasa tidak dipisahkan pula dari unsur budaya? Memang dalam struktur Kurikulum 2013 pelajaran bahasa sudah ada, tetapi yang ada adalah pelajaran bahasa Indonesia sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Mengapa Mendikbud tidak menghargai keberadaan bahasa daerah yang bisa menyatukan lagi kesatuan bangsa jika bahasa daerah itu bisa lebih dipahami oleh kelompok etnis lainnya? Bukankah melalui bahasa manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat?

Dari kenyataan ini tampak bahwa wajah "monokulturalisme" di dunia pendidikan kita masih kentara. Rancangan struktur Kurikulum 2013 pun masih didominasi oleh pendekatan keseragaman (etatisisme). Dalam kondisi seperti ini, tuntutan dari berbagai daerah akan pendekatan yang semakin beragam dan demokratis perlu diakomodasi. Salah satunya dengan memasuk-

kan mata pelajaran bahasa daerah dalam struktur Kurikulum 2013.

Keberadaan bahasa daerah sebagai salah satu unsur budaya perlu dihargai lagi oleh pemerintah pusat dengan menempatkan mata pelajaran bahasa daerah dalam struktur kurikulum nasional 2013. Keberadaan bahasa daerah harus dipelajari dan dipahami lebih jauh, karena bersifat unik dan kompleks. Dengan dipelajari dan dipahami keunikan dan kekompleksan bahasa daerah akan terjalin komunikasi lebih baik dan efektif, sehingga memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain.

Konsep pengembangan bahasa daerah di kalangan peserta didik sangat kita butuhkan. Menghilangkan bahasa daerah pada Kurikulum 2013 dengan alasan bahwa daerah dewasa ini dihuni oleh etnis dan pamakai bahasa yang sudah heterogen bukan merupakan alasan yang tepat. Alasannya, etnis yang diam di suatu daerah bukan hanya untuk menumpang hidup, tetapi juga mampu menggunakan bahasa daerah di lingkungan tempat dia berada.

Dengan digunakannya bahasa daerah setempat oleh para pendatang, akan menimbulkan rasa kebersamaan karena masyarakat setempat

merasa dihargai keberadaannya. Bukankah bahasa merupakan salah satu identitas adanya suatu masyarakat? Sebagaimana dikatakan oleh Koentjaraningrat bahwa masyarakat itu dicirikan oleh adanya penggunaan bahasa yang sama. Jika bahasa daerah dihilangkan dalam rancangan struktur Kurikulum 2013, tidak beda artinya dengan membunuh secara sistematis keberadaan bahasa daerah.

Menyerahkan penempatan kurikulum bahasa daerah bergantung kepada kebijakan gubernur masing-masing yang digagas Kemendikbud bukan jalan keluar yang baik. Jika hal ini dilakukan, pemerintah pusat berarti "cuci tangan" terhadap eksistensi bahasa daerah. Seharusnya pemerintah pusat merasa mempunyai kewajiban untuk menempatkan bahasa daerah dalam Kurikulum 2013 sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai *counter* terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Adapun menyerahkan pengembangan muatan isi kurikulum bahasa daerah kepada gubernur, memang hal itu yang harus dilakukan karena pemerintah daerahlah yang lebih tahu tentang muatan isinya. Tampaknya jalan tersebut di atas yang mesti dilakukan. ***